

PENGELOLAAN DEFISIT ANGGARAN SEBAGAI UPAYA MENCAPAI KETAHANAN FISKAL DI INDONESIA

Ivantia S. Mokoginta

(Disampaikan pada acara Orasi Ilmiah DIES Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan tanggal 23 Januari 2014 di
Bandung)

Pada hari ini, tanggal 23 Januari 2014, saya berkesempatan untuk membawakan orasi ilmiah dalam acara DIES Fakultas Ekonomi Unpar tahun 2014. DIES kali ini bertema "*Sustainability*". Sesuai dengan tema tersebut, maka orasi ilmiah pada acara ini akan mengangkat judul "Pengelolaan Defisit Anggaran Sebagai Upaya Mencapai Ketahanan Fiskal di Indonesia". Judul ini diangkat mengingat, bahwa ketahanan fiskal mulai mendapat perhatian sejak terjadinya krisis ekonomi di Asia pada tahun 1997-1998. Pada saat peningkatan beban pengeluaran pemerintah akibat krisis tidak diimbangi oleh penambahan pendapatan, maka ketahanan fiskal terganggu. Akibatnya, peran pemerintah untuk memberikan stimulan pada saat terjadi depresi akan ikut terganggu.

Secara umum, ketahanan fiskal didefinisikan sebagai seberapa jauh kebijakan fiskal yang saat ini berjalan dapat dipertahankan tanpa menimbulkan masalah utang di kemudian hari (Blanchard, 1990). Dalam konteks ini, skema anggaran berhubungan dengan kebijakan pendapatan dan pengeluaran pemerintah serta pembiayaan anggaran seandainya terjadi defisit pada anggaran. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka pembahasan tentang ketahanan fiskal harus dilihat sebagai keseluruhan manajemen anggaran pemerintah dalam jangka panjang baik dari sisi penerimaan, pengeluaran maupun pembiayaannya. Keseluruhan manajemen tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pengelolaan risiko

fiskal, terutama bila dikaitkan dengan unsur pembiayaan. Dengan demikian, pengelolaan risiko fiskal akan sangat memengaruhi ketahanan fiskal.

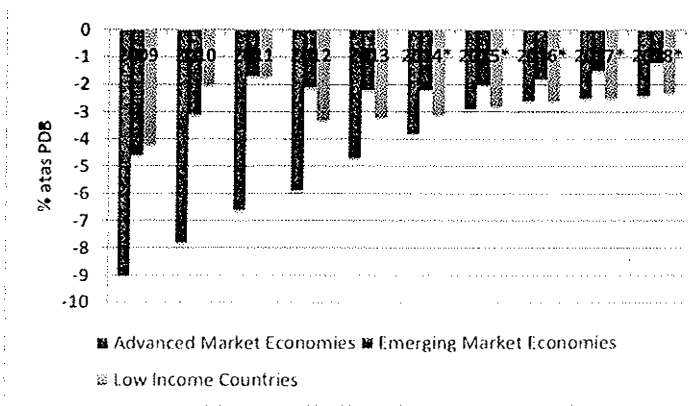
Para hadirin yang saya hormati. Orasi kali ini bertujuan untuk membahas upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai ketahanan fiskal melalui pengelolaan risiko fiskal yang lebih baik. Secara umum ditunjukkan, bahwa upaya tersebut telah sesuai dengan rencana pemerintah Indonesia yang tertuang dalam dokumen *Rusia's G20 Presidency 2013*. Uraian dalam orasi ini akan diawali oleh kondisi fiskal secara global. Kemudian diikuti oleh perkembangan ketahanan fiskal di Indonesia serta berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk meningkatkan ketahanan fiskal. Perkembangan tersebut dilihat melalui dua indikator utama ketahanan fiskal yaitu rasio defisit anggaran (*overall deficit*) terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB. Selanjutnya, upaya pemerintah akan ditunjukkan melalui pengelolaan anggaran defisit dan risiko fiskal yang lebih baik serta ditunjang oleh reformasi sistem lembaga keuangan.

Para hadirin yang saya hormati. Ketahanan fiskal merupakan faktor penting untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Oleh sebab itu, pemerintah dari berbagai negara berupaya untuk memperbaiki kondisi ketahanan fiskal negaranya. Gambaran global tentang kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran defisit secara global semakin baik. Hal ini terlihat dari perkembangan indikator ketahanan fiskal, yaitu rasio defisit terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB berdasarkan kelompok negara (lih. Grafik 1 – 4). Kondisi ini mengindikasikan adanya optimisme ketahanan fiskal untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi global berkelanjutan.

Grafik 1 menunjukkan, bahwa perkembangan rasio defisit anggaran terhadap PDB cenderung membaik secara global. Penurunan yang tajam terlihat pada kelompok *Advanced Market Economies* dan *Emerging Market*

Economies. Proyeksi IMF menunjukkan optimisme pengelolaan defisit anggaran yang semakin baik sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan rasio tersebut dalam kurun waktu 2013 sampai dengan 2018. Untuk kelompok G20, Grafik 2 menunjukkan, bahwa pengelolaan anggaran defisit juga semakin baik sehingga rasio defisit anggaran terhadap PDB menurun.

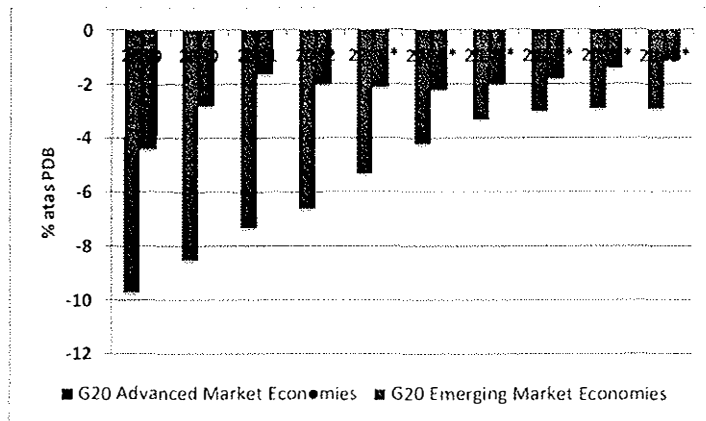
Grafik 1 Perkembangan Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB



Catatan: *proyeksi IMF.

Sumber: Tabel 1, Tabel 5 dan Tabel 9 (International Monetary Fund, 2013)

**Grafik 2 Perkembangan Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB
Kelompok G20**

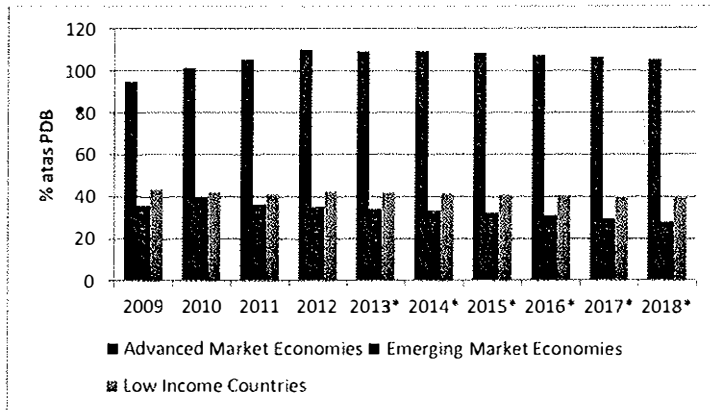


Catatan: *proyeksi IMF.

Sumber: Tabel 1 dan Tabel 5 (International Monetary Fund, 2013)

Indikator ketahanan fiskal lain seperti rasio utang terhadap PDB secara global juga menunjukkan perkembangan yang semakin baik (lih. Grafik 3 dan Grafik 4). Kondisi ini menunjukkan bahwa bagian PDB yang dipakai untuk membayar utang cenderung menurun. Proyeksi IMF memberikan gambaran yang juga optimis.

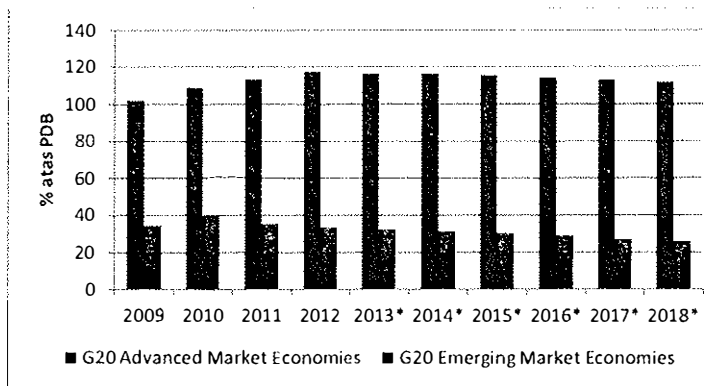
Grifik 3 Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB



Catatan: *proyeksi IMF.

Sumber: Tabel 4, Tabel 8 dan Tabel 11 (International Monetary Fund, 2013)

Grifik 4 Perkembangan Rasio Utang terhadap PDB Kelompok G20



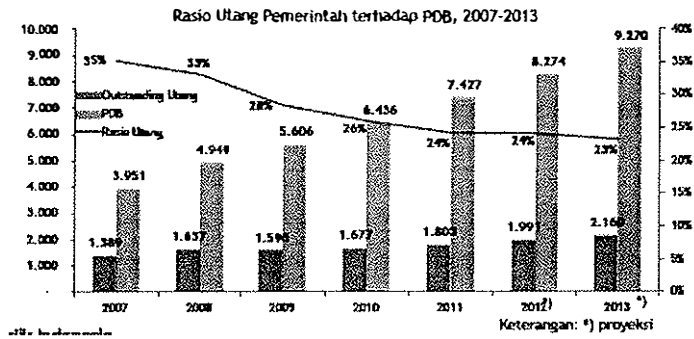
Catatan: *proyeksi IMF.

Sumber: Tabel 4 dan Tabel 8 (International Monetary Fund, 2013)

Beberapa catatan yang dapat diambil berdasarkan Grafik 1 sampai dengan 4 adalah negara-negara yang termasuk dalam kelompok *Emerging Market Economies* menunjukkan kecenderungan perkembangan ketahanan fiskal yang lebih baik daripada *Advanced Market Economies*. Hal ini terlihat dari penurunan rasio utang terhadap PDB yang lebih cepat pada kelompok *Emerging Market Economies*. Salah satu hal yang bisa menjelaskan adanya perbedaan tersebut adalah perubahan struktural sektor keuangan, pengelolaan portofolio utang negara yang lebih baik selain juga menggali sumber pendapatan dalam negeri yang masih dapat dilakukan di negara-negara kelompok *Emerging Market Economies* seperti Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati. Upaya pemerintah Indonesia untuk mencapai ketahanan fiskal dapat diukur dari beberapa indikator ketahanan fiskal yang umum dipakai. Grafik 5 menunjukkan perkembangan ketahanan fiskal selama periode 2007 – 2013 berdasarkan rasio utang pemerintah terhadap PDB. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan utang yang lebih baik dengan, antara lain, mengalihkan sebagian utang luar negeri menjadi utang dalam negeri melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

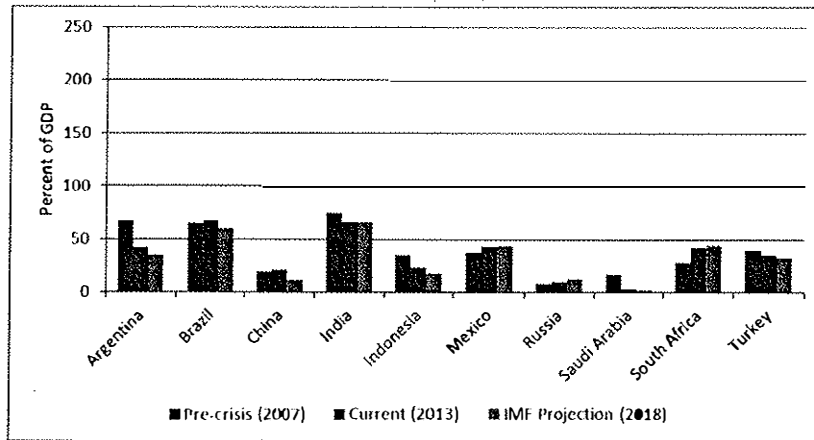
Grafik 5 Rasio Utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB



Sumber: Kementerian Keuangan (2013a, hal. 1)

Grafik di atas menunjukkan adanya *trend* yang menurun sepanjang periode 2007 – 2013. Hal ini berarti bahwa bagian PDB yang digunakan untuk melunasi hutang cenderung menurun. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan negara-negara yang termasuk dalam kelompok *Emerging Market Economies* pada umumnya, posisi rasio tersebut masih lebih baik. Posisi Indonesia masih lebih baik daripada negara-negara Amerika Latin, India, Afrika Selatan dan Turki. Selain itu, IMF memproyeksikan penurunan lebih lanjut untuk tahun 2018 (lih. Grafik 6).

Grafik 6 Rasio Utang terhadap PDB (dalam persen)



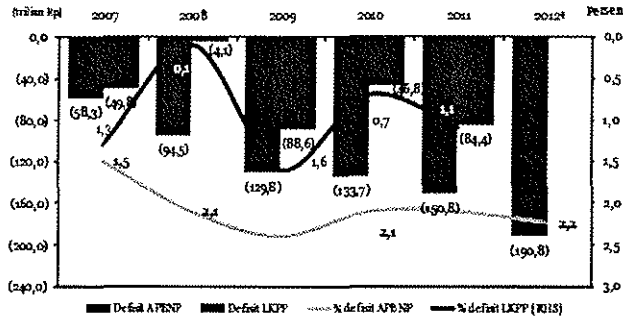
Sumber: Rusia's G20 Presidency (2013a).

Rasio utang terhadap PDB sebesar 23 persen pada akhir tahun anggaran 2013 merupakan target yang cukup masuk akal bila dilihat dari perkembangan serta posisi rasio tersebut sebesar 24 persen sampai dengan tahun 2012 (lih. Grafik 5). Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan utang jangka menengah cukup efektif. Strategi ini dijalankan melalui pengalihan sebagian utang luar negeri menjadi utang dalam negeri. Adapun tujuan dari pengalihan tersebut adalah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013b, Bab 7, hal, 17): (1) mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber domestik melalui penerbitan SBN Rupiah maupun penarikan pinjaman dalam negeri; (2) melakukan pengembangan instrumen utang agar diperoleh fleksibilitas dalam memilih berbagai instrumen yang lebih sesuai, *cost efficient*, dan risiko yang minimal; (3) melakukan pengadaan pinjaman luar negeri sepanjang digunakan untuk memenuhi kebutuhan prioritas, dengan *terms and conditions* yang wajar (*favourable*) bagi Pemerintah, dan tanpa agenda politik dari kreditur; (4) mempertahankan kebijakan pengurangan pinjaman luar negeri dalam

periode jangka menengah; (5) meningkatkan koordinasi dengan otoritas moneter dan otoritas pasar modal, terutama dalam rangka mendorong upaya *financial deepening*; serta (6) meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan pinjaman dan *sovereign credit rating*. Keseluruhan strategi tersebut sesuai dengan *overall strategy for debt sustainability* terutama dalam butir 1 tentang pencarian sumber utang yang lebih fleksibel dan *cost efficient* sebagaimana tertulis dalam dokumen *G20 Emerging Market Economies*. Pada akhirnya, keseluruhan strategi di atas diarahkan pada upaya penurunan risiko fiskal.

Para hadirin yang saya hormati. Perkembangan realisasi defisit anggaran cenderung berfluktuasi. Walaupun demikian, trend dari realisasi tersebut cenderung menurun sebagai mana ditunjukkan dalam Grafik 7 (defisit LKPP dan % defisit LKPP). Defisit anggaran berada di kisaran 1,5 persen sampai dengan 2,2 persen dalam kurun waktu 2007 - 2012 yang berarti di bawah batas aman 3 persen terhadap PDB sebagaimana ditargetkan dalam RAPBN 2013 (Kementrian Keuangan 2013b, Bab 1, hal. 6). Selain itu, realisasi defisit anggaran selalu lebih rendah daripada perkiraan sebagai mana ditunjukkan oleh defisit APBNP dan defisit APBN LKPP. Berdasarkan kedua indikator tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa defisit anggaran masih berada dalam batas-batas kewajaran.

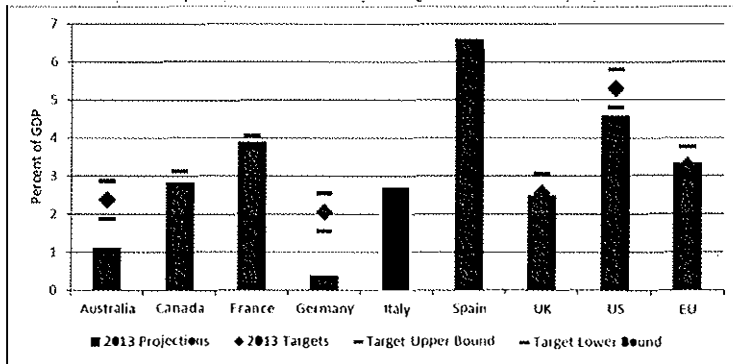
Grafik 7 Perkembangan Keseluruhan Defisit Anggaran



Sumber: Kementerian Keuangan (2013b, Bab 6, hal. 2)

Dibandingkan dengan beberapa negara anggota G20, posisi Indonesia masih lebih baik daripada US dan rata-rata negara anggota EU (lih. Grafik 8) dan beberapa negara lain seperti Argentina, India, Mexico dan Afrika Selatan (lih. Grafik 9).

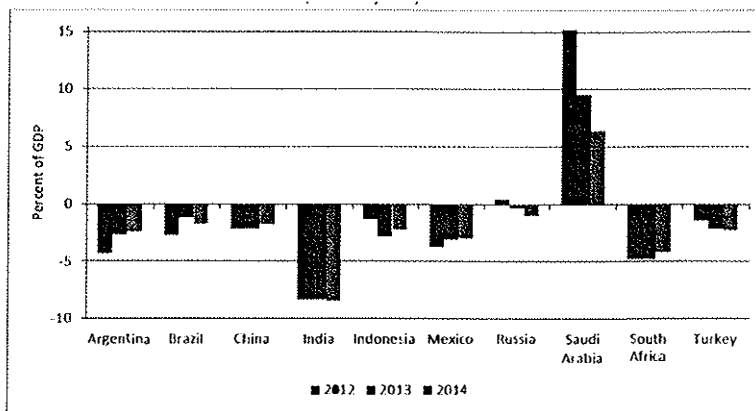
Grafik 8 Perkembangan Proyeksi Defisit Anggaran Pemerintah Beberapa Negara Maju tahun 2013



Source: April 2013 Fiscal Monitor; Updated data from 2013 IMF Article IV for France, Germany, Spain, US
 Note: Korea has a fiscal surplus and Japan was exempt from the Toronto Commitment. For the Accountability Assessment, the UK is assessed using its cyclically adjusted primary balance, and using a target based on the Spring 2010 WEO. The US is assessed using IMF forecasts of the federal government deficits.

Sumber: Rusia's G20 Presidency (2013a)

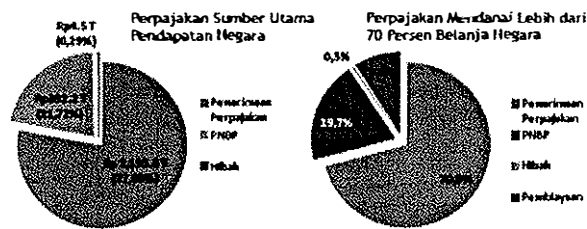
Grafik 9 Proyeksi IMF tentang Ratio Defisit Anggaran terhadap PDB untuk Beberapa Negara



Sumber: Rusia's G20 Presidency (2013a).

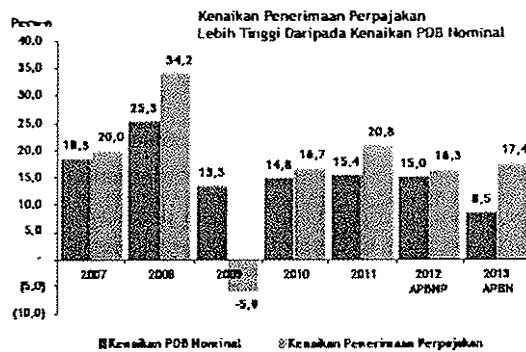
Hal ini dapat dicapai karena adanya upaya pemerintah untuk menggali potensi penerimaan dalam negeri. Kontribusi pajak dapat berperan sebagai *built-in stabilizer* dalam perekonomian. Dengan demikian, semakin besar peran pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah maka akan semakin besar peran pajak tersebut sebagai stabilizer. Perkembangan kontribusi penerimaan pajak dalam penerimaan dalam negeri serta peningkatan penerimaan perpajakan dengan peningkatan PDB dapat dilihat pada Diagram 1 dan Diagram 2 berikut ini. Kedua diagram tersebut menunjukkan, bahwa sumber penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan utama bagi pengeluaran pemerintah. Penerimaan pajak terus meningkat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio pajak terhadap PDB yang terus meningkat.

Diagram 1 Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap Total Penerimaan Dalam Negri 2013



Sumber: Kementerian Keuangan (2013a, hal. 1)

Diagram 2 Kenaikan Penerimaan Perpajakan terhadap Kenaikan PDB Nominal



Sumber: Kementerian Keuangan (2013a, hal. 1)

Walaupun demikian, pengelolaan defisit anggaran membutuhkan strategi pengelolaan jangka panjang yang melibatkan reformasi kelembagaan keuangan sebagaimana telah dilaksanakan. Reformasi ini sangat erat kaitannya dengan pengelolaan risiko fiskal yang mulai dijalankan sejak tahun anggaran 2008.

Para hadirin yang saya hormati. Brixi dan Mody (2002) membagi risiko fiskal kedalam empat tipologi, yaitu risiko yang bersifat eksplisit karena merupakan kewajiban hukum pemerintah, implisit yang didasari atas kewajiban moral pemerintah, kewajiban langsung karena merupakan kewajiban yang harus dijalankan terlepas apakah didasarkan pada hukum atau tanggung jawab moral dan kewajiban tidak langsung yang muncul secara tidak terduga tetapi harus dilaksanakan terlepas karena adanya kewajiban hukum atau moral. Berdasarkan tipologi ini, maka risiko fiskal sebagaimana dijelaskan dalam RAPBN 2013 dapat dijabarkan kedalam Tabel 1 Matriks Risiko Fiskal berikut ini.

Tabel 1 Matriks Risiko Fiskal

Sumber	Kewajiban langsung	Kewajiban kontinjen
Eksplisit (berdasarkan kontrak dan aturan perundang-undangan)	Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Pinjaman luar negeri, Pinjaman dalam negeri	Risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, risiko refinancing
	Non-discretionary spending: Belanja pegawai (gaji dan pensiun), belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, pengeluaran subsidi, belanja transfer ke daerah, belanja pendidikan dan kesehatan.	Peningkatan anggaran pendidikan sebagai akibat pertumbuhan populasi, kewajiban penyediaan DAU dan DBH sebagai akibat pemekaran, dana alokasi kesehatan dan pendidikan, dana otonomi khusus, peningkatan belanja subsidi sebagai akibat faktor pasar global, program jaminan sosial nasional, pensiun dan tabungan hari tua PNS.
	Keikutsertaan pada organisasi dan/atau lembaga keuangan internasional yang telah ada	Operasionalisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggung jawab atas pengelolaan Program Jaminan Sosial Nasional
	Dukungan/jaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur (program KPS, viability gap fund, dukungan untuk pengadaan lahan, fasilitas dana proyek geotermal). Kewajiban pemerintah untuk menambah modal negara pada lembaga keuangan tertentu (BL, LPS, LPEI).	Tuntutan hukum pihak ketiga terhadap pemerintah
Implisit (Kewajiban dan tanggung jawab moral)	Program Jaminan Sosial Nasional dalam jangka panjang	Bencana alam Utang pemerintah daerah yang gagal bayar atau proyek pemerintah daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah

Sumber: Tabel diadopsi dari Brixi dan Mody (2002) dan RAPBN 2013 (Bab 6).

Informasi yang dapat kita tarik berdasarkan Tabel 1 di atas adalah: sebagian besar risiko fiskal yang mungkin muncul merupakan kewajiban pemerintah yang bersifat eksplisit, sehingga pemerintah diwajibkan oleh aturan hukum dan/atau kontrak untuk memenuhi kewajiban tersebut. Akibatnya, dana anggaran yang tersedia untuk tujuan *counter-cyclical fiscal policy* untuk mengatasi masa krisis ekonomi terbatas. Hal ini dapat mengancam ketahanan fiskal dan keberlanjutan perekonomian Indonesia

dalam jangka panjang. Untuk itu, pemerintah berupaya mengelola risiko fiskal lebih baik misalnya dengan menggali potensi dalam negeri sebagai sumber penerimaan pemerintah misalnya melalui penerimaan pajak serta penerapan sistem *hedging* sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Berdasarkan informasi dalam Tabel 1 tersebut, maka dapat dibuat *Matriks Hedging* Risiko Fiskal yang dikembangkan oleh Brixi dan Mody (2002). Matriks ini menunjukkan alternatif sumber pembiayaan untuk menutupi atau memitigasi risiko fiskal. Sumber-sumber tersebut dibagi dalam empat tipologi, yaitu (1) sumber eksplisit berdasarkan kepemilikan pemerintah atas aset dan hak untuk meningkatkan penerimaan; (2) sumber implisit yang didasarkan atas sumber-sumber pembiayaan tidak langsung; (3) sumber pembiayaan langsung berdasarkan aset yang dimiliki dan (4) sumber kontinjen yang baru terealisasi pada saat dana benar-benar diterima pemerintah. Matriks *Hedging* Risiko Fiskal berdasarkan RAPBN 2013 disajikan dalam Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Matriks *Hedging* Risiko Fiskal

Sumber-sumber	Sumber Dana Langsung	Sumber Dana Kontinjen
Eksplisit	Non-perbankan dalam negeri: hasil investasi pemerintah dan PMN, pengelolaan aset, dana pengembangan pendidikan nasional, cadangan pembiayaan, privatisasi	Pembiayaan utang: penerbitan Surat Berharga Negara, pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri
	Perbankan dalam negeri: rekening pembangunan hutan, penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, saldo anggaran lebih, rekening pemerintah lainnya, eks moratorium NAD, Nias, Sumut	Non-perbankan dalam negeri: kewajiban penjaminan kepada kreditur perbankan/badan usaha yang dapat menjadi penerimaan negara bukan pajak.
	Penerimaan pajak dan non-pajak setelah dikurangi kewajiban transfer ke daerah dan alokasi dana penjaminan	Peningkatan penerimaan pajak dan non-pajak
Implisit	Seniorage	Keuntungan yang diterima dari BUMN Surplus cadangan devisa karena adanya perubahan nilai tukar

Sumber: diadaptasi dari Brixi dan Mody (2002) dan RAPBN 2013 (Bab 6)

Berdasarkan matrik *hedging* di atas, maka pemerintah Indonesia telah memperhitungkan tentang bagaimana risiko fiskal yang dapat muncul diatasi.

Para hadirin yang saya hormati. Brixi dan Mody (2002) selanjutnya menjelaskan bahwa pengelolaan risiko fiskal dalam upaya menjaga ketahanan fiskal memerlukan tiga faktor pendukung, yaitu:

Pertama, keterlibatan sektor swasta dalam upaya mitigasi risiko khususnya melalui pengembangan sektor keuangan. Hal ini telah dilakukan pemerintah melalui perijinan yang diberikan kepada lembaga keuangan non-bank milik swasta nasional maupun internasional untuk menyediakan jasa asuransi harta tak bergerak, kesehatan, kematian dan pengelolaan dana pensiun dan tabungan hari tua. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang terdiri atas PT.

Persero Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), PT. Persero Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negri (TASPEN), PT. Persero Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan PT. Persero Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES) yang bergerak di bidang penyediaan jasa asuransi ketenagakerjaan, kesehatan dan pengelolaan dana pensiun dan tabungan hari tua (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013a).

Pemerintah juga sudah memanfaatkan pasar keuangan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebagai salah satu sumber pembiayaan defisit anggaran. SBN merupakan surat berharga pemerintah yang dijual di pasar keuangan dalam negeri baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing. Tujuan dari penerbitan SBN adalah diversifikasi utang negara, sehingga utang tersebut tidak hanya berasal dari utang luar negeri saja. Diversifikasi ini merupakan salah satu upaya untuk meredam gejolak perubahan nilai tukar dan tingkat suku bunga luar negeri sehingga dapat memberikan keeluasaan bagi pemerintah untuk memanfaatkan dana pinjaman yang relative berisiko lebih rendah dibandingkan pinjaman luar negeri (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013a).

Kedua, transfer risiko kepada pihak yang lebih mampu untuk menanggung risiko yang muncul melalui *risk-sharing management*. Langkah ini telah dijalankan oleh pemerintah melalui program Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) misalnya program pengembangan infrastruktur. Pemerintah menyediakan dana jaminan pendukung proyek pengembangan infrastruktur melalui mekanisme KPS. Jaminan ini digunakan untuk pengadaan tanah dan *viability gap fund (VGF)* yang merupakan dukungan langsung dalam bentuk dana tunai yang diberikan oleh Pemerintah kepada proyek KPS. Tujuan penyediaan jaminan tersebut adalah untuk menjadikan tarif layanan yang dihasilkan proyek KPS terjangkau oleh masyarakat penggunaanya. Di

samping itu, VGF bertujuan juga untuk memberikan akses yang luas dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPS dengan memberikan subsidi terhadap biaya investasi (*capital cost*). Subsidi tersebut khususnya disediakan bagi proyek KPS yang secara ekonomi layak namun secara finansial tidak layak (Kementerian Keuangan, 2013b, Bab 6, hal. 71).

Untuk menunjang kegiatan tersebut, pemerintah mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) yang merupakan BUMN. BUMN ini bertujuan untuk (Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, 2011): (1) meningkatkan kelayakan kredit atas proyek-proyek KPS infrastruktur melalui pemberian penjaminan atas risiko infrastruktur; (2) meningkatkan tata kelola dan proses yang transparan dalam pemberian penjaminan atas risiko proyek infrastruktur yang terkait dengan tindakan dan tidak adanya tindakan pemerintah; (3) memfasilitasi keberhasilan transaksi bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) melalui penyediaan penjaminan bagi proyek KPS yang telah distruktur dengan baik; (4) memagari (*ring-fence*) kewajiban kontinjensi Pemerintah dan meminimalkan kejutan langsung (*sudden shock*) atas APBN.

Peran pemerintah sebagai penjamin terlihat pada masa terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997/98 di mana pemerintah harus menyediakan dana talangan untuk menutupi hutang-hutang bank-bank umum yang dilikuidasi kepada masyarakat. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran yang tidak terduga sebagai penjamin kegiatan perbankan. Lembaga ini bertugas untuk: (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan; (2) melaksanakan penjaminan simpanan; (3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan; (4) merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak

sistemik; (5) melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik (Lembaga Penjamin Simpanan, 2011).

Dalam operasionalisasinya, bank-bank anggota LPS membayar premi sebagai *blanket guarantee* dana simpanan nasabah. *Blanket guarantee* ini diberikan sampai dengan jumlah simpanan tertentu. Sementara jaminan jumlah simpanan di atas jumlah tersebut akan ditutupi oleh hasil penjualan kekayaan bank seandainya terjadi kegagalan bank. Pemerintah juga menyediakan dana penjaminan operasionalisasi organisasi LPS. Oleh sebab itu, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dapat merupakan bagian dari penerimaan pemerintah bukan pajak (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2013b).

Ketiga, mengelola risiko yang tidak dapat dimitigasi atau ditransfer kepada pihak manapun misalnya melalui penyisihan dana cadangan dan *hedging*. Sementara ini, penyisihan dana cadangan masih merupakan kebutuhan utama misalnya untuk mengatasi dampak bencana alam seperti gempa bumi, banjir, gunung meletus, tanah longsor dan sebagainya. Besar dana yang dialokasikan didasarkan pada data historis kebutuhan dana bagi daerah-daerah yang rentan bencana alam. Dari data tersebut terlihat bahwa dana cadangan untuk bencana alam cenderung meningkat karena kebutuhan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah bencana yang terus meningkat (Kementerian Keuangan 2013b, Bab 6, hal. 77). Selain itu, pemerintah masih berada pada tahap penyusunan peraturan terkait masalah *financial derivatives* yang berhubungan dengan *hedging*. Instrumen keuangan ini bermanfaat untuk mitigasi risiko fiskal sebagai akibat gejolak tingkat suku bunga, nilai tukar dan harga komoditas seperti komoditas energi.

Saat ini, pengawasan dan pengaturan lembaga keuangan ditangani oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi, tugas dan

kewenangan mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. Lembaga jasa keuangan lainnya termasuk pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan-perusahaan sekunder perumahan dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib meliputi penyelenggaraan program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2011).

Para hadirin yang saya hormati. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali beberapa catatan tentang pengelolaan anggaran defisit pemerintah. Pengelolaan risiko fiskal menjadi bagian yang sangat penting bagi ketahanan fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Secara global pengelolaan defisit anggaran yang semakin baik menunjukkan optimisme seluruh negara-negara dalam mengejar laju pertumbuhan tersebut. Hal ini terlihat dari indikator-indikator ketahanan fiskal yang cenderung membaik dari waktu ke waktu.

Upaya pemerintah Indonesia selama ini dalam mengelola defisit anggaran hingga mencapai batas kewajaran telah berhasil memperbaiki kondisi ketahanan fiskal. Hal ini ditunjukkan oleh perkembangan beberapa indikator ketahanan fiskal Indonesia yang cenderung membaik. Posisi indikator-indikator tersebut juga cenderung lebih baik dibandingkan dengan posisi beberapa negara lain. Upaya tersebut menunjukkan adanya optimisme untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Menggali potensi penerimaan dalam negeri melalui penerimaan pajak, pengalihan sebagian utang luar negeri menjadi utang dalam negeri serta reformasi lembaga keuangan merupakan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengelola anggaran defisit. Selain itu, pengembangan *financial derivatives* yang masih dalam tahap penyusunan aturan akan sangat membantu dampak dari gejolak mata uang, tingkat suku bunga dan komoditas energi terhadap risiko fiskal anggaran pemerintah. OJK yang telah didirikan pemerintah menjadi lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengatur pengelolaan pasar derivatives dan keuangan saat ini. Lembaga ini menjadi tulang punggung pengelolaan stabilitas keuangan di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan risiko fiskal untuk mencapai ketahanan fiskal membutuhkan strategi yang bersifat menyeluruh.

Sekian dan terima kasih.

Daftar Pustaka

- Blanchard, O. J. (1990, April). *Suggestions for a new set of fiscal indicators*. Retrieved September 10, 2013, from OECD: <http://www.oecd.org/eco/outlook/2002735.pdf>
- Bixi, H. P., & Mody, A. (2002). Dealing with government fiscal risk: an overview. In H. P. Bixi, & A. Schick, *Government at Risk: Contingent Liabilities and Fiscal Risk* (pp. 21 - 58). Washington, DC & New York: World Bank and Oxford University Press.
- Indonesia Infrastructure Guarantee Fund. (2011). *Latar Belakang Perusahaan*. Retrieved Oktober 22, 2013, from IIGF - PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero): <http://www.iigf.co.id/Website/AboutIIGF.aspx>
- International Monetary Fund. (2013). *Fiscal Monitor: Fiscal Adjustment in an Uncertain World*. Washington, DC: IMF.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013a). *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2013*. Retrieved September 9, 2013, from <http://www.anggaran.depkeu.go.id/Content/APBN%202013.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013b). *Nota Keuangan & Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Lembaga Penjamin Simpanan. (2011). *Fungsi, Tugas & Wewenang - Lembaga Penjamin Simpanan*. Retrieved Oktober 15, 2013, from Lembaga Penjamin Simpanan: <http://www1.lps.go.id/in/web/guest/fungsi-tugas-wewenang>
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2011, November 22). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Rusia's G20 Presidency. (2013a, September 6). *Annex 4: Accountability Assessment Chart Pack*. Retrieved Oktober 24, 2013, from Official Materials: <http://www.g20.org/documents/#p2>

Rusia's G20 Presidency. (2013b, September 6). *Annex 2: St. Petersburg Fiscal Strategies of Emerging Market Economies*. Retrieved Oktober 24, 2013, from Official Materials: <http://www.g20.org/documents/>
